

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kawasan Asia Timur merupakan kawasan di mana sedang terjadi sebuah pergeseran kekuatan (power shift) yang menjadi ciri utama dari sebuah tata regional yang sedang berkembang dan ditandai oleh tiga kecenderungan besar, yaitu : Kebangkitan RRC, dominasi dan primacy (keutamaan) AS, serta revitalisasi peran Jepang. Selain itu, Kawasan Asia Timur dewasa ini diwarnai dengan kontradiksi dan merupakan kawasan yang penuh ironi. Disatu sisi dapat dikatakan, bahwa perkembangan strategis di kawasan Asia Timur selama 10 tahun terakhir cukup kondusif, stabil dan dinamis, sehingga negara-negara di kawasan dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada upaya pemulihan ekonomi mereka, tetapi disisi lain, sulit disangkal bahwa di kawasan ini sebenarnya juga menyimpan potensi konflik, bahkan sikap permusuhan sisa-sisa politik perang dingin masih kental mewarnai hubungan internasional.

Dalam hal ini kepentingan Negara-negara besar semakin dipertaruhkan dari waktu ke waktu. Hal ini semakin terasa sejak terjadinya serangan teroris 11 September 2001 atas World Trade Centre (WTC) dan Pentagon di AS, serta sejak dicanangkan “War of Terror” oleh AS. Secara umum perilaku Negara-negara besar di kawasan masih diwarnai persaingan, namun demikian keamanan nasional dan kedaulatan nasional mereka masih sensitive satu sama lain. Perubahan-perubahan di bidang politik, ekonomi, dan keamanan beberapa tahun belakang ini telah menempatkan Asia Timur kembali dalam perhitungan-perhitungan strategis negara-negara besar dunia.

Banyak pendapat menyatakan bahwa China sebagai kekuatan yang tumbuh secara damai (Peaceful Rising) secara perlahan bangkit menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia dan penetrasinya di kawasan Asia Timur sulit untuk

dibendung, terlebih keanggotaanya dalam komunitas Asia Timur semakin diperkuat kehadirannya secara ekonomi di kawasan ini. Kebangkitan China merupakan fenomena yang paling penting sebagai proses kekuatan di Asia Timur.

David Shambaugh mengatakan bahwa struktur kekuatan dan parameter interaksi yang telah menjadi ciri hubungan internasional di kawasan Asia selama setengah abad lalu, sekarang ini sedang dipengaruhi secara fundamental, antara lain oleh meningkatnya kekuatan ekonomi, militer dan pengaruh politik RRC, serta posisi diplomatik dan keterlibatan negara itu dalam institusi multilateral regional, sehingga karakteristik hubungan negara-negara besar di Asia Timur dalam dekade mendatang akan diwarnai oleh respon terhadap kebangkitan China yang merupakan sebuah fenomena yang menggambarkan kebangkitan suatu kekuatan baru di Asia Timur yang oleh banyak pihak diperkirakan akan mampu menyaingi dominasi AS karena secara ekonomi, RRC telah menjadi sebuah “raksasa” yang impresif.¹

Para pengambil keputusan AS bahkan sepakat bahwa dalam kurun waktu sekitar 30 tahun mendatang RRC akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi terbesar setelah AS, melampaui Jepang dan Eropa di Asia Pasifik. Kemajuan ekonominya yang dinilai fantastis akan memberikan nilai lebih pada wajah baru Asia Timur dan memungkinkan RRC mengalokasikan sebagian kekayaannya untuk memodernisasi dan membangun kekuatan militer.

Pada saat yang sama, semakin pentingnya China secara ekonomi dan militer, memberi ruang bagi China untuk memperkuat posisi diplomatik dan pengaruhnya di kawasan yang berpotensi melahirkan sebuah pergeseran kekuatan dengan segala implikasinya. Akibatnya, kawasan Asia Timur dihadapkan pada persoalan klasik dalam hubungan internasional, yaitu bagaimana merespon dan mengelola kelahiran kekuatan baru tersebut karena potensi konflik masih dipunyai oleh China dengan beberapa negara seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan yang tampaknya masih

¹ David Shambaugh, “The Rise of China and Asia’s New Dynamics,” dalam David Shambaugh, ed, *Power Shift : China and Asia’s New Dynamics* Berkeley : University of California Press, 2005, hal 1.

merupakan suatu ganjalan yang dapat mempengaruhi perkembangan hubungan-hubungan antara negara di kawasan Asia.

Terlepas dari masih adanya ketegangan China dengan ketiga negara tersebut, disisi lain China sebenarnya saat ini sedang mengalami masalah dalam batas teritori dan perebutan Sumber Daya Alam (SDA) di luar wilayahnya. Terkait dengan hal tersebut, China tampak melakukan pengembaraan ke Kepulauan Spratly dan Paracel yang diduga mempunyai kandungan minyak yang cukup besar, meskipun Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Taiwan yang juga mengklaim wilayah tersebut.

Disisi lain, bahwa pihak yang dapat menguasai Kepulauan Paracel, dengan mudah dapat mengawasi navigasi di bagian utara LCS, sedangkan dengan menguasai kepulauan Spratly bisa mengontrol rute maritime yang menghubungkan Pasifik atau Asia Timur dengan Samudera Hindia. Mengingat posisi strategis Kepulauan tersebut oleh China maka kepulauan tersebut harus dipertahankan.

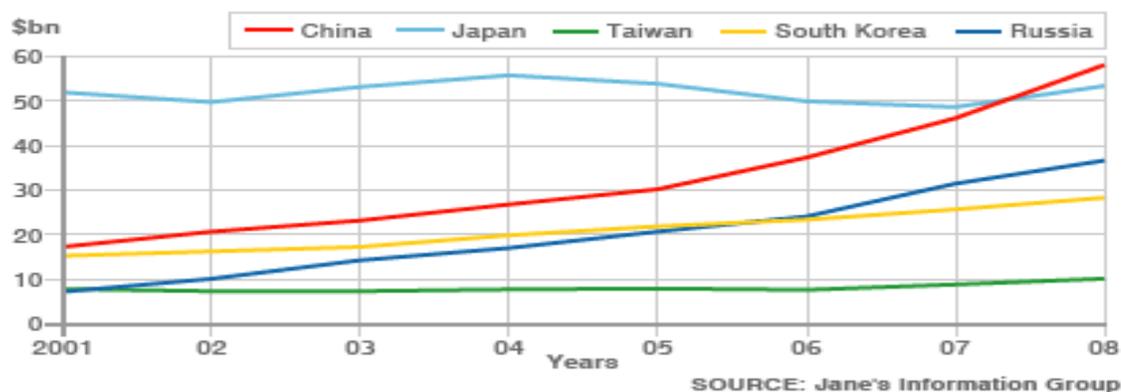
Kecurigaan akan kemungkinan penggunaan kekuatan militer pada masa yang akan datang nampaknya dapat dipahami dengan kenaikan alokasi anggaran belanja militer China. Apalagi kenaikan anggaran ini dilakukan tidak lama setelah China menguji Rudal jarak menengahnya yang berhasil menghancurkan satelit diorbitnya. Pemerintah China mengumumkan kenaikan alokasi anggaran belanjanya militer untuk tahun fiskal 2007 sebesar 17,8 persen dari alokasi tahun anggaran 2006. Analisis militer di Barat memperkirakan besarnya anggaran belanja militer China untuk tahun 2007 akan menjadi 44,94 milyar dollar Amerika. Peningkatan anggaran belanja militer China tidak terlepas dari booming ekonomi China secara keseluruhan. Saat ini China merupakan pihak dengan cadangan devisa terbesar kedua di dunia setelah Jepang. Bahkan tidak mustahil beberapa tahun kedepan akan menyusul Jepang.

Selain peningkatan anggaran, upaya modernisasi kekuatan militer China juga terus diupayakan, termasuk diantaranya profesionalisme pasukannya (personil), yaitu

dengan jalan perampingan organisasi serta modernisasi peralatan militer. China yang tadinya berkiblat kepada peralatan militer bekas negara Uni Soviet, kini berupaya untuk mengadopsi standar Barat. Berdasarkan Jane's information group, anggaran militer China meningkat tajam dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Rusia.

Upaya kemandirian pemenuhan peralatan militer dilakukan dengan pemberdayaan dan pembinaan terpusat industri militer. Produk-produk inovatif lebih diutamakan dengan jalan adaptasi perkembangan teknologi peralatan militer baik yang datang dari Timur maupun dari Barat. Upaya ini tidak begitu sulit bagi China dikarenakan mereka sudah memiliki sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang sangat memadai.

DEFENCE SPENDING: REGIONAL VIEW



(Tahun: 2008)

Peningkatan anggaran militer China dan kemampuan PLA, dalam konteks sistem internasional yang berlaku di kawasan adalah kekhawatiran China akan pergeseran kekuatan yang ada di Asia Timur. Tercatat beberapa aliansi dan kerjasama militer diantara AS, Jepang dan Australia menyebabkan China melakukan upaya modernisasi peralatannya. Pada tataran makrostrategi, upaya China untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan dapat berimplikasi pada perimbangan strategis di kawasan. Tingkah laku China, sebagai sebuah negara bangsa di Asia Timur, sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal terutama sikap

dan kebijakan AS dan para sekutu AS seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan baik secara individu maupun gabungan. Dengan kata lain, secara hipotesis faktor China dalam hubungan segitiga AS-China-Sekutu AS akan menentukan lingkungan politik, keamanan, dan ekonomi kawasan Asia Timur.

Hal tersebut dapat dilihat dari ditandatanganinya Deklarasi Aliansi Keamanan untuk abad ke-21 antara AS dan Jepang dalam mewujudkan keberadaan strategi pertahanan perang bintang (star wars) yang digabungkan dengan rencana pembangunan sistem pertahanan rudal nasional (national missile defense system) di wilayah nasional setiap negara sekutu AS seperti Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Australia yang sudah dimulai sejak awal tahun 2003. Kondisi tersebut ditentang China yang berpendapat aliansi tersebut seharusnya tidak ada seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin.

Untuk meminimalisasikan dan menyeimbangkan keberadaan aliansi tersebut, China menjalankan strategi diplomatik menjalin hubungan militer lebih erat dengan Rusia dan mendukung penuh rezim keamanan multilateral di kawasan Asia Pasifik yakni ASEAN Regional Forum (ARF). Kemudian, di bidang ekonomi China juga secara maksimal menjalin kesepakatan perdagangan bilateral (Bilateral Free Trade Agreement) dengan beberapa negara anggota ASEAN.

Kondisi ini telah memaksa China untuk mempercepat proses modernisasi sistem pertahanannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila yang sangat pertama kali dibidik China pada awal tahun 2007 ini adalah kemampuan menembak sasaran musuh di ruang angkasa. Hal ini disebabkan dalam kalkulasi militer baik strategi pertahanan perang bintang maupun sistem pertahanan rudal nasional AS dan sekutu-sekutunya hanya dapat dipatahkan secara dini di luar angkasa. Kemudian menjelang akhir tahun 2007, sebagai awal tahun dari *grand strategy* pertahanan China, diupayakan pengembangan angkatan bersenjata China yang unggul dalam kemampuan tempur berbasis teknologi informasi.

Upaya penguatan militer China diperkuat lagi dengan pidato Presiden China Hu Jintao pada kongres ke-17 Partai Komunis China (PKC) menyatakan bahwa China harus segera mengembangkan kemampuan militer yang berteknologi tinggi. Secara eksplisit, pemimpin PKC tersebut juga menginformasikan bahwa lima tahun ke depan, sasaran strategis pengembangan kekuatan militer China yakni membangun angkatan bersenjata yang terkomputerisasi, unggul dalam kemampuan tempur berbasis teknologi informasi, serta didukung oleh prajurit bermutu tinggi dalam jumlah besar. Hu Jintao juga menyatakan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) hanya berupaya mempercepat proses modernisasi militernya dan tidak akan pernah terlibat dalam perlombaan senjata maupun mengancam negara manapun. Hu Jintao menekankan, keberadaan angkatan bersenjata China adalah untuk bertahan dan hanya untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara tersebut. Namun, masyarakat internasional termasuk negara-negara di kawasan Asia Timur tetap khawatir akan ambisi peningkatan kemampuan militer China. Hal itu disebabkan pergeseran perimbangan kekuatan dalam era pasca Perang Dingin terjadi bersamaan dengan tampilnya China sebagai kekuatan politik dan militer khususnya di Kawasan Asia Timur.

B. PERUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

Bagaimana strategi militer China periode 2003-2007 menghadapi aliansi AS dengan negara sekutunya di Asia Timur ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Memahami strategi pertahanan dan militer China menghadapi kerjasama pertahanan AS dan aliansinya di Asia Timur.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Berbagai perubahan yang terjadi dilingkup global telah menyebabkan peningkatan perhatian negara-negara di Asia Timur pada isu keamanan. Implikasi dari perubahan global terhadap kawasan Asia Timur adalah munculnya suatu lingkungan keamanan baru yang ditandai oleh ketidakpastian akibatnya kolapsnya Uni Soviet dan maraknya ancaman baru yaitu terorisme.

Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan global pasca Perang Dingin mempengaruhi pula persepsi dua aktor besar di kawasan yaitu China dan AS tentang situasi internasional dan sumber-sumber ancamannya. Situasi keamanan di Asia Timur menunjukkan tidak adanya ancaman langsung yang dapat menimbulkan instabilitas di kawasan tersebut. Ketegangan-ketegangan dalam hubungan bilateral tetap ada namun tidak sampai mengganggu perdamaian. Namun demikian situasi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan terjadinya konflik regional dalam lingkup dan skala yang lebih kecil.

Pada tataran level of analisis mengenai teori dari “Ancaman China” merupakan hal yang fundamental dalam dinamika politik regional. Adanya korelasi antara power politik dan China sebagai kekuatan dimasa mendatang menjadikan teori realis tepat untuk menganalisa tingkah laku China dikawasan. Kenneth Waltz memprediksi bahwa China akan menjelma sebagai kekuatan besar. China disinyalir akan membangun hegemoni di Asia Timur dan menjadi *competitor* utama AS di kawasan.²

Sementara kebijakan AS adalah mengintegrasikan China kedalam ekonomi dan politik internasional. Namun demikian China sebagai kekuatan tetap ingin membentuk sistim internasional sesuai dengan keinginannya. Beberapa studi memperlihatkan bahwa China sebagai kekuatan status-quo, seperti yang dikemukakan oleh Alstair Ian Johnston. Disebutkan bahwa China dalam perilaku internasional dan

² Kenneth Waltz, “*Structural Realism after the Cold War*,” *International Security*, vol 125, No.1, 2000, hal 32

regional memastikan bahwa China bukan sebuah kekuatan yang *revisionist*.³ Namun demikian, pendapat lain mengatakan sebaliknya. Disebutkan bahwa China dimasukkan kedalam *great power*, dengan karakteristiknya sebagai *offensive realism* dan berperilaku sebagai kekuatan *revisionist*.

Pendekatan realis terhadap China

Teori realis menyatakan bahwa sistem internasional, kelangsungan hidup bernegara adalah tujuan akhir. Negara mempunyai inisiatif untuk memelihara keberadaan *balance of power* untuk menjaga stabilitas di dunia yang serba anarki. Hal tersebut dapat menuntun negara untuk mencari keseimbangan ancaman external lewat aliansi dan memelihara distribusi kekuasaan.⁴

Di bawah paradigma ini, negara dalam membangun politik luar negerinya dan tingkah laku internasionalnya mendasarkan diri pada karakter kecurigaan, pembangunan aliansi dan hubungan antar negara berdasarkan kepentingan nasional. *Offensive realis*, berargumen bahwa negara tidak puas terhadap *Balance of Power* sebab tidak ada ruang di sistem internasional untuk kekuatan *status-quo*. Negara mempunyai insentif untuk meningkatkan powernya.

Perhatian AS terhadap Asia Timur dapat dilihat dari pernyataan Christopher Hill (Wakil asisten menlu urusan Asia Timur dan Pasific) didepan Sub-Komite Asia Pasific dari Komite Hubungan Internasional, DPR AS bahwa tidak ada bagian dari dunia lainnya yang memiliki manfaat dan tantangan potensial untuk AS kecuali Asia Timur. Asia Timur penting untuk AS baik alasan-alasan ekonomi maupun alasan-alasan politik dan keamanan.⁵

³ Ian Alstair Johnston, "Is China a status-quo power?" *International Security*, Vol 27, No.4, 2003, p.5-56.

⁴ Kenneth Waltz, *Theory of international politics*, New York, Mc Graw Hill, 1979, hal.60.

⁵ Christopher R Hill, "Emergence of China in the Asia-Pacific Economic and Security Consequences for the US" 7 Juni 2005. diambil dari <http://foreign.senate.gov/testimony/2005/HillTestimony050607.Pdf>.

Ketika kehadiran politiknya dinilai menurun akibat berakhirnya Perang Dingin, bidang ekonomi menjadi pilihan untuk mempertahankan pengaruh dan kehadirannya di kawasan. Dalam konteks ini, kerjasama ekonomi seperti APEC memberi ruang bagi AS dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi, khususnya di Asia Timur.

Dalam buku putih tentang Strategi Keamanan AS tahun 2006 menegaskan bahwa stabilitas dan kemakmuran kawasan sangat tergantung pada keterlibatan yang berkelanjutan dari AS, yaitu mempertahankan kemitraan dengan negara-negara kawasan dengan dukungan pengeluaran pertahanan ke depan.

Untuk itu dengan pertimbangan geopolitik dan dalam upaya menanamkan pengaruhnya, maka AS memandang perlunya peningkatan kerjasama dengan aliansinya di Asia Timur. Pengertian Aliansi disini adalah sebuah konfigurasi *power* dimana negara berusaha mempertahankan kelangsungan hidup serta menciptakan peluang untuk memajukan kepentingan nasionalnya dengan mentautkan *power* yang dimiliki terhadap satu atau lebih negara lain yang memiliki kepentingan serupa. Pola aliansi merupakan keputusan untuk mengubah atau mempertahankan equilibrium lokal, regional, atau global. Tindakan demikian biasanya diikuti oleh pihak negara lain dengan tindakan serupa. Dengan demikian pola aliansi mengungkapkan penampilan khas negara blok versus negara blok lainnya. Pola *power* seperti ini kerap dibentuk berdasarkan perjanjian persekutuan yang bersifat resmi, namun kesepakatan atau persekutuan yang bersifat kurang formil juga dapat berlangsung.⁶

Aliansi adalah sebuah perjanjian untuk saling mendukung secara militer jika salah satu negara penandatanganan perjanjian diserang oleh negara lain: selain itu aliansi ditujukan untuk memajukan kepentingan bersama di antara negara anggota. Aliansi dapat bersifat bilateral atau multilateral, rahasia atau terbuka, sederhana atau sangat terorganisir, dapat berjangka lama atau pendek, serta dapat dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan sebuah perang. Sistem *Balance of Power*

⁶ Jack C Plano dan Roy Olton "The International Relation Dictionary" terjemahan oleh Wawan Juanda, Diterbitkan oleh Putra A Bardin, 1999 hal 11 dan 137.

cenderung mendorong terbentuknya pakta militer untuk mengimbangi perubahan dalam keseimbangan kekuatan. Piagam PBB mengakui hak untuk “membela diri secara kolektif” yang tercantum dalam pasal 51.

Pola aliansi saat ini merupakan teknik yang paling banyak dipergunakan oleh negara di dunia yang dipacu untuk memperbesar kekuatan nasional serta menjamin kepentingan keamanan nasional. Berbagai kritik seperti diungkapkan oleh Woodrow Wilson menyatakan bahwa perimbangan kekuatan dengan memakai sarana aliansi militer merupakan ancaman terhadap perdamaian karena pada dasarnya pola power demikian mendorong terjadinya perang, dan akhirnya menjadi antitesis terhadap keamanan nasional serta internasional. Gejala seperti ini seringkali disebutkan dalam bentuk terminologi “*security – insecurity paradox*” : yaitu manakala sebuah negara meningkatkan keamanannya melalui aliansi, maka keamanan pada pihak lainnya akan menjadi lemah, sehingga mendorong negara tersebut untuk memperkuatnya. Dengan demikian timbul sebuah siklus yang memperkuat suhu ketegangan; dan pada masa sekarang gejala seperti ini disebut sebagai *balance of terror* karena adanya persenjataan nuklir. Meskipun demikian pola aliansi tetap diminati dan diterapkan oleh banyak negara karena (1) keterbatasan pola unilateralisme pada abad teknologi yang semakin maju, (2) runtuhnya sistem negara untuk membentuk kondisi yang esensial bagi terselenggaranya pola keamanan kolektif secara universal atau membangun sistem kerjasama dalam sebuah pemerintahan dunia; dan (3) bahaya yang menyatu dalam wujud sebuah negara yang berusaha untuk mendominasi dunia dengan kekerasan.

Kebanyakan aliansi kontemporer meluas ke dalam organisasi regional yang bekerjasama untuk ikhwal ekonomi, social, pemerintahan, penyelesaian konflik secara damai, serta masalah militer. Sistem aliansi yang berfungsi ganda meliputi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Sistem aliansi lainnya seperti Liga Arab, *Organization of African Unity* (OAU) melingkupi komitmen untuk memajukan kepentingan keamanan bersama yang lebih bersifat politik daripada militer. Kendati aliansi dapat membantu terciptanya perasaan aman serta menangkal agresi, namun aliansi juga dapat menjadi sumber ketegangan internasional serta pembentukan

aliansi tandingan. Persaingan aliansi cenderung mengakibatkan terjadinya pacu senjata, krisis, serta perang. Sistem aliansi yang berfungsi sebagai mekanisme *balance of power* nampaknya akan tetap berlanjut hingga terbentuknya sistem keamanan kolektif yang bersifat universal.

Aliansi dapat juga dalam bentuk bilateral *Security Pact* perjanjian dua negara yang mengikrarkan dukungan militer jika mereka diserang oleh negara ketiga. Pakta keamanan bilateral dapat memberikan bantuan yang segera dan tanpa batas jika terjadi serangan terhadap salah satu negara tersebut, atau mereka dapat melakukan konsultasi sebelum melakukan tindakan balasan. Pakta ini juga ditujukan kepada setiap negara yang menyerang salah satu diantara mereka, atau bersifat terbatas untuk melakukan tindakan terhadap serangan yang dilakukan oleh negara tertentu yang terancam dalam pakta.

Dalam laporan pada tahun 2006, Departemen Pertahanan AS, Pentagon, mengemukakan bahwa disebutkan adanya usaha-usaha RRC mempersenjatai diri dengan alat-alat militer yang canggih. Laporan yang disampaikan kepada Kongres AS ini secara mendetail mencatat trend-trend kemampuan RRC untuk menghambat masuknya kekuatan pasukan lain ke seluruh wilayahnya melalui sebuah kombinasi pesawat penyerbu, kapal selam dalam rudal-rudal canggih. Dengan penambahan kekuatan militernya ini, RRC memiliki kemampuan untuk menangani berbagai konflik di wilayahnya dan melindungi sumber-sumber energinya. Menurut Pentagon, kecenderungan terbaru ini memungkinkan RRC memiliki kemampuan untuk melancarkan rangkaian opsi-opsi militer Asia jauh melampaui Taiwan. Hal ini dapat menciptakan sebuah ancaman yang berarti terhadap kekuatan-kekuatan militer modern yang ada di kawasan....”kekuatan militer modern” merujuk ke militer Jepang atau Angkatan Laut AS”⁷

Fenomena tersebut nampaknya telah membuat AS sebagai *super power* tunggal merasa sebagai negara yang paling terganggu oleh persoalan klasik tersebut, sebab

⁷ Laporan tahunan Pentagon Mei 2006, <http://www.defensenling.mil/pubs>.

kepentingan strategi utama AS di Asia Timur, sekarang dan dimasa mendatang akan tetap terfokus pada pemeliharaan dominasi dan keutamaan AS di kawasan. Dalam kaitan ini, kebangkitan RRC merupakan suatu hal yang paling signifikan dan sekaligus merupakan tantangan strategis terbesar bagi masa depan AS di kawasan. Disatu sisi, AS harus mampu merespon dan mengakomodasikan kebangkitan RRC sehingga dapat menjadi aktor dan mitra kawan yang baik dalam menjamin stabilitas kawasan. Disisi lain, AS harus bisa memainkan peran agar RRC tidak menjadi tantangan bagi dominasinya di kawasan.

Ketidakpastian tersebut telah melahirkan strategi AS yang sering disebut sebagai strategi pemagaran (*hedging strategy*) dimana AS bermaksud membuka peluang bagi dirinya dalam mempertahankan hubungan ekonomi yang menguntungkan dengan RRC, sambil menangani ketidakpastian akan meningkatnya kerisauan di bidang keamanan yang ditimbulkan oleh kebangkitan RRC.⁸ Dalam hal ini AS menjalankan kebijakan yang kompetitif dan kooperatif sekaligus terhadap RRC, seraya mendorong RRC menjadi bagian dari institusi internasional. Strategi ini tercermin dalam perkembangan kebijakan AS terhadap Jepang dan India sebagai sekutunya. Terhadap Jepang AS mendorongnya untuk memainkan peran keamanan yang lebih besar.

Sebagai kekuatan tunggal terbesar sepertinya AS memang tidak bisa lepas dari keharusannya untuk selalu memonitor dan mengawasi kawasan Asia Timur yang merupakan kawasan yang sangat penting untuk menjalankan strateginya. Permasalahan Taiwan dengan RRC dalam sengketa Selat Taiwan menjadi sedemikian penting, mengingat perseteruan Taiwan-RRC dapat memicu perang RRC-AS. Terlebih setelah keduanya sama-sama berpegang kepada suatu aturan main, dimana RRC mengesahkan UU non-damai yang dapat menyerang Taiwan, sementara AS berpegang pada *Taiwan Relations Act* untuk membantu Taiwan jika diserang. Disisi lain, AS menyetujui penjualan sembilan unit peluncur rudal anti rudal patriot (PAC 2 dan PAC 3) kepada Taiwan sebagai penangkal serangan rudal balistik RRC.

⁸ Evan S Medeiros, "Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability" The Washington Quarterly, Winter 2005-2006, hal 145.

Dalam menerapkan strategi pemagarannya, AS memperkuat kerjasama aliansi pertahanannya dengan Jepang sebab keanggotaan Jepang dalam komunitas Asia Timur dapat dipandang merupakan salah satu kekuatan besar dari kepentingan jangka panjang AS dimana AS menjanjikan Jepang sebagai penghubung antara AS dan Asia. Dalam kapasitasnya tersebut Jepang dapat menjamin peran dan hadirnya AS di Asia timur di masa datang.⁹

Dalam hal ini Jepang memegang peran kunci bukan hanya bagi stabilitas kebijakan dan strategi AS di kawasan Asia Timur tetapi juga menentukan kecenderungan strategi kawasan, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Keterkaitan antara stabilitas regional Asia Timur dan peran militer Jepang memang merupakan hal yang kompleks. Disamping itu, Jepang mendukung kerjasama multilateral ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara karena dianggap dapat memajukan dan menjaga stabilitas perekonomian kawasan. Disisi lain, keterlibatan Jepang dalam kancah pergeseran kekuatan di Asia Timur juga mengisyaratkan adanya kepentingan Jepang untuk menjadi aktor besar di kawasan, bersaing dengan China dan Korea Selatan.

Perubahan kebijakan Jepang dan peran Jepang di kawasan Asia Timur tentunya tidak dapat dipisahkan dari hubungan bilateralnya dengan AS. Hal ini tercermin dari aliansi Jepang-AS beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan peran serta aktif Jepang dalam kerangka Theatrical Missile Defence (TMD) dan Proliferation Security Initiative (PSI). Bagi Jepang, menguatnya aliansi ini, terutama dalam kerangka TMD, mengimbangi ancaman nuklir Korea Utara. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa TMD merupakan pengukuhan hegemoni AS dalam dinamika kawasan di Asia Timur, ditambah dengan kebijakan penempatan pasukan AS di Jepang, yang merupakan perwujudan nyata kehadiran militer AS di kawasan.

⁹ Yusuf Wanandi, "East Asia Community and the role of Japan", The Jakarta Post February 2, 2006

Strategi Pertahanan China

Persepsi AS tentang adanya ancaman China dan Kerjasama Pertahanan AS dengan Jepang dan Taiwan telah menjadikan poin penting China untuk membangun strategi pertahanan China di Asia Timur. Menurut Basil Liddell-Hart strategi adalah seni mendistribusikan dan penerapan policy dengan cara militer. Hedley Bull menyatakan bahwa strategi adalah eksploitasi kekuatan militer untuk pelaksanaan sebuah kebijakan. Sedangkan Collin Andrew menyatakan bahwa strategi adalah hubungan antara kekuatan militer dengan tujuan politik.¹⁰

Strategi pertahanan yang dilaksanakan suatu negara sangat bervariasi hal ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti geografi, potensi nasional, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Semua faktor tersebut dapat disebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebab sarana yang tersedia akan memperluas atau mempersempit ruang gerak dari kemungkinan cara yang dapat digunakan. Semakin banyak sarana yang tersedia akan semakin banyak cara yang mungkin dilakukan, tergantung dari kemampuan panglima untuk menatanya secara harmonis. Untuk menguraikan pengertian strategi sangat beragam tergantung dari sejarah suatu bangsa dalam pengalamannya melaksanakan perang, kemajuan ilmu pengetahuan serta pendekatan politik yang berlaku pada kurun waktu tertentu.

Strategi pertahanan secara umum dipahami sebagai suatu seni (*art*) untuk mencapai tujuan pertahanan yaitu perlindungan kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa dengan keterbatasan sumber-sumber yang tersedia. Karena itu strategi hanya bisa dirumuskan jika perumusan tentang tujuan pertahanan dan identifikasi ancaman/tantangan atau skenario perkembangan yang dihadapi dilakukan secara jelas. Strategi mensyaratkan kejelasan tentang apa yang hendak dicapai. Secara normatif pada tingkat paling atas ini disebut sebagai tujuan nasional yang akan dicapai melalui pilar ekonomi, pilar pertahanan dan militer, dan pilar

¹⁰ Craigh A Synder (ed). *Contemporary Security and Strategy*, UK Macmillan, 1999 hal 4.

politik. Strategi pertahanan hanyalah salah satu dari upaya untuk mencapai tujuan nasional. Tanpa tujuan nasional, strategi pertahanan tidak mempunyai arah.¹¹

Dalam Buku Putih Pertahanan Nasional China disebutkan bahwa tujuan keamanan nasional Nasional China adalah melindungi kedaulatan, melakukan modernisasi dan menciptakan stabilitas nasional. China mengambil kebijakan pertahanan yang defensif yang mencakup beberapa aspek antara lain mengkonsolidasi pertahanan nasional, melawan agresi, meredam gerakan subversi bersenjata, mempertahankan keamanan dan integrasi wilayah, persatuan dan kedaulatan negara. Kebijakan China untuk modernisasi pertahanannya hanyalah untuk mempertahankan diri. Pembangunan kekuatan China bukan merupakan ancaman bagi siapapun, maupun menjadi ancaman kekuatan hegemoni, namun lebih ditujukan pada usaha untuk menciptakan perdamaian. Namun seandainya hegemoni dan politik kekuasaan masih ada dan terus berkembang khususnya, usaha untuk melakukan reunifikasi secara damai terhalangi, China akan meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan dengan kekuatan militer.

China menekankan kemandirian sebagai landasan untuk menjaga keamanan negara dan tetap menyusun kebijakan pertahanan nasional dan strategi pembangunan secara mandiri. China tidak berkeinginan untuk membentuk aliansi dengan negara lain ataupun bergabung dengan suatu blok militer. China berprinsip mengutamakan operasi-operasi defensif, mempertahankan diri dan hanya memberikan serangan balasan jika diserang terlebih dahulu. Pertahanan seperti ini berarti menggabungkan usaha untuk penangkalan perang dengan persiapan-persiapan untuk memenangkan perang, mempertahankan diri pada masa damai dan melakukan kebijakan pertahanan strategis dengan operasi ofensif taktis pada masa perang. Untuk mencapai tujuan tersebut, disamping mengandalkan diri pada persenjataan yang ada, angkatan bersenjata *China People's Liberation Army (PLA)* atau Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang mendalam

¹¹ Edy Prasetyanto, *Strategi Pertahanan Indonesia di Masa Depan*, Disampaikan pada Seminar Nasional tentang Pertahanan Indonesia di Era Globalisasi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 15 Januari 2008.

dilingkungan militer internasional dan siap melakukan operasi-operasi pertahanan menggunakan persenjataan berteknologi tinggi.

Strategi pertahanan dibentuk oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor ideologis-normatif. Faktor *kedua* adalah tujuan nasional dalam kurun waktu tertentu yang merupakan penjabaran dari faktor pertama yang berisi prioritas-prioritas program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Faktor *ketiga* adalah faktor geografis yang membentuk konsepsi tentang geopolitik dan geostrategi. Faktor geografis mempunyai 3 nilai strategis bagi kepentingan keberlangsungan hidup: *pertama*, bahwa geografi adalah area bermain bagi mereka yang merancang dan melaksanakan suatu strategi; *kedua*, bahwa geografi adalah parameter fisik yang secara unik membentuk pilihan-pilihan teknologi, taktik, sistem logistik, institusi, dan budaya militer suatu masyarakat; dan *ketiga*, bahwa geografi merupakan suatu inspirasi yang membentuk pemahaman bersama tentang perpolitikan dalam batas-batas fisik geografis tersebut. Geografi membentuk karakteristik strategis dan karakteristik militer dari suatu masyarakat atau negara apakah akan lebih bersifat kontinental, perairan atau kondisi-kondisi tertentu. Selain itu, kekuatan militer diorganisir berdasarkan lingkungan/matra operasi mereka yang terdiri dari darat, air, udara, dan ruang angkasa dengan menggunakan instrumen khusus atau taktik khusus yang secara geografis unik untuk suatu wilayah tertentu untuk tujuan efisiensi dan efektifitas.¹²

Dilihat dari sudut geografi, ancaman terhadap kedaulatan China dewasa ini berasal dari darat maupun laut. Dari laut difokuskan adalah konflik Laut China Timur dengan kemungkinan AS terlibat didalamnya. Potensi konflik yang dapat terjadi di Laut China Timur melibatkan China, Jepang dan Taiwan. Begitu juga dengan ancaman di garis perbatasan, permasalahan nuklir di Korut, aktivitas teroris di Xinjiang, pengamanan jalur energi laut terutama di Selat Malaka. Masalah keamanan ini menghasilkan penyesuaian strategi pertahanannya dan menghasilkan apa yang dinamakan “*beishounangong*” (berupa proyeksi postur pertahanan yang defensif di

¹² Ibid.

Utara, Barat Laut dan Barat Daya serta Pertahanan Ofensif di sepanjang Selat Taiwan).¹³

Untuk memahami strategi pertahanan China, dari konteks sejarah pembentukan militer China dan hubungannya dengan Partai Komunis China. Hal tersebut dikarenakan peran yang sama dalam pembentukan negara komunis China, serta perjuangannya dalam melawan kaum Nasionalis (Kuomintang) , pengalaman perang melawan Jepang di Manchuria serta keterlibatan dalam Perang Korea telah menjadikan TPR sebagai tentara yang profesional. Perkembangan selanjutnya hubungan sipil militer militer China – Partai Komunis China (PKC) serta adopsi soviet model dalam regulasi dan standarisasi TPR mewarnai perkembangan militer China. Adopsi tersebut salah satunya disebabkan adanya embargo militer dari negara barat.¹⁴

Pembentukan Strategi pertahanan China juga dilihat dari karakteristik hubungan sipil-militer antara PKC dengan TPR dapat dilihat dalam beberapa komponen antara lain : Kesamaan ideology dan revolutionary, adanya status politik yang seimbang serta kesamaan dalam kepentingan yang sama.¹⁵ Puncak dari kerjasama sipil-militer RRC ini dapat dilihat ketika peristiwa Tianamen dimana dukungan TPR terhadap PKC dalam menghadapi demonstrasi rakyat. Hubungan sipil-militer direfleksikan dalam komando tertinggi dari TPR. Pemimpin Partai secara otomatis menjadi komando tertinggi dalam CCP Central Military Commision (CMC) dengan dibantu oleh perwira lainnya seperti General Staff Departement, General Political Affairs Departement, General Logistical Departement, dan General Armament Departement dan empat angkatan lain seperti AD, AL, AU dan Kekuatan Strategi rudal.

Dalam bidang perumusan kebijakan pertahanan ditentukan oleh kelompok pemimpin di jajaran elit pimpinan Partai Komunis China. Perumusan kebijakan

¹³You Ji, “*In Search of A Capable Fighting Force : Chinese Military Modernization and Transformation*”, seminar tanggal 16 Desember 2008, Dephan RI.

¹⁴ Ibid

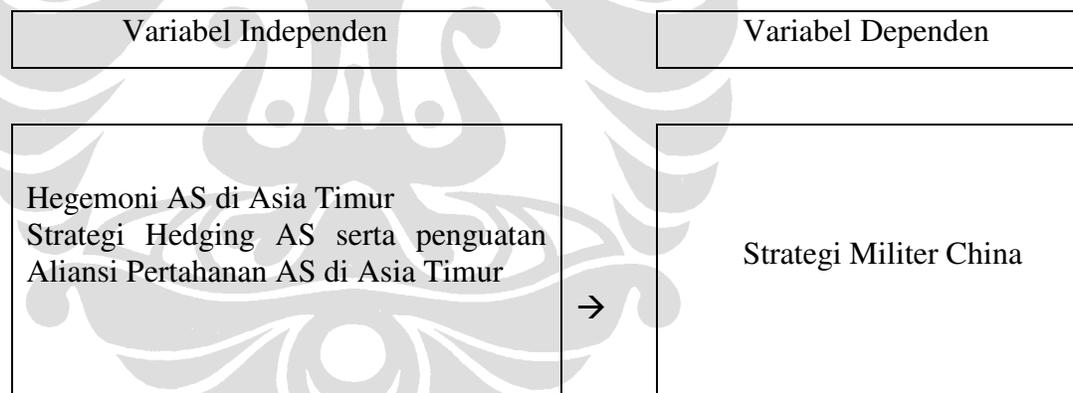
¹⁵ Li, Nan, *Chinese Civil-Military Relations*, London : Routledge, 2006.

pertahanan di China selalu melibatkan partai dan militer. Hal ini disebabkan oleh perkembangan komunisme China yang tidak terpisahkan dengan kekuatan militer selama revolusi kelompok komunis melawan kelompok nasionalis. Oleh karena itu, strategi kebijakan militer juga tergantung oleh ketua PKC yang sedang memimpin. Oleh karena itu kebijakan pertahanan dan strategi militer China periode 2003-2007, juga dipengaruhi oleh kepemimpinan Hu Jintao yang diangkat menjadi Ketua PKC sejak 2004 menggantikan Li Peng.

E. HIPOTESA

Dalam merespon aliansi AS dan sekutunya di Asia Timur, Strategi Militer China bersikap defensif, melakukan modernisasi dan peningkatan kapabilitas.

F. MODEL ANALISA



G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analistis. Deskriptif karena menggambarkan kondisi-kondisi yang menjadi variabel independen dan variabel dependen yang merupakan dasar dari permasalahan yang dibahas. Penulisan bersifat analistis karena menjelaskan keterkaitan antara variabel independent dan variabel dependen.

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari serta meneliti data yang terkumpul melalui buku-buku, majalah atau jurnal serta literatur yang relevan dengan pembahasan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Selanjutnya untuk mempermudah pemahaman, proposal ini dibagi dalam beberapa Bab antara lain :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, diuraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metodologi dan Sistematika Penulisan.

Bab II Hegemoni AS dan Kerjasama Pertahanan Dengan Negara-Negara di Asia Timur.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hegemoni AS di Asia Timur, Persepsi tentang Ancaman China dan Kerjasama Pertahanan AS dengan Jepang, Kerjasama AS dengan Taiwan dan Kerjasama AS dengan Korea Selatan.

Bab III. Militer China (TPR) sebagai pilar pertahanan China dan persepsi Ancaman AS dan aliansinya.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah pembentukan TPR, Hubungan TPR dan Partai Komunis China, TPR pasca Deng Xiaoping dan Persepsi ancaman AS dan aliansi terhadap Kepentingan China.

Bab IV. Strategi Militer China Dalam Menghadapi AS beserta Aliansinya.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Strategi dan Doktrin Militer China, Masalah Reunifikasi Taiwan dan Masalah Laut China Selatan.

Bab V Kesimpulan

